

**RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG  
KEBIJAKAN FISKAL KHUSUS PAJAK DALAM  
MENGHADAPI RESESI DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**  
**DWITA SUKMALIA**  
**NIM. 1711130100**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dwita Sukmalia, NIM 1711130100 dengan judul **“Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia”**. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 4 Agustus 2021 H  
25 Zulhijah 1442 M

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP. 196606161995031002

**Amimah Oktarina, M.E.**  
NIP. 1992102112018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia”**, ditulis oleh **Dwita Sukmalia NIM.1711130100**, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Rabu**  
Tanggal: **21 Juli 2021 M/ 11 Zuhhijah 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah dipertahai, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, **4 Agustus 2021 M**  
**25 Zuhhijah 1442 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

**Amimah Oktarina, M.E.**  
NIP. 1992102112018012001

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

**Adi Setiawan, M.E.I.**  
NIP. 198803312019031005



Mengetahui:  
Bekas

**Dr. Asnaini, M.A.**  
NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya dalam Menghadapi Resesi di Indonesia” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Artikel Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Juli 2021



Dwita Sukmalia  
NIM. 1711130100

## MOTTO

*This World is like a shadow. If you try to catch it, you will never be able to do so. If you turn your back towards it, it has no choice but to follow you*

*Don't chase the dunya because the dunya is running from you and your time is ticking. Run towards the Akhirah, strive for your Akhirah strive to please Allah. And the world will come to you.*

*(Ibn Al-Qayyim)*

*Tidak pernah ada kata gagal  
bagi kamu yang terus berusaha  
Kegagalan hanya hadir saat kamu  
sudah berhenti untuk mencoba*

*(Dwita Sukmalia)*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil Alamin. Terima kasih kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- ❖ *Diri saya sendiri yang mampu bertahan, berjuang dan berusaha sekuat tenaga. Terima kasih telah melakukan semua kerja keras dan tidak pernah berhenti. Terima kasih telah selalu memberikan lebih dari yang saya terima.*
- ❖ *Kedua orangtua ku tercinta Ayahanda Edy Prayitno dan Ibunda Hartati Nengsi sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas curahan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta doa yang selalu mengiringi langkahku menggapai cita-cita.*

- ❖ *Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang adikku Shelli Yunita Sari dan Ifan Setiawan yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material dan selalu mengharapkan keberhasilanku.*
- ❖ *Dosen Pembimbing bapak Dr. Nurul Hak, M.A. dan Amimah Oktarina, M.E. yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.*
- ❖ *Sahabat-sahabatku semua yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.*
- ❖ *Teman-teman Ekonomi Syariah (EKIS) kelas C angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menemani, memberikan semangat yang tinggi dalam menyelesaikan skripsi ini.*

- ❖ *Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- ❖ *Almamater hijau kebanggaanku yang selalu mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.*

*Terimalah ini sebagai bukti kasih ku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya di setiap langkahku.*

## ABSTRAK

### **Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia**

**Oleh :**  
**Dwita Sukmalia**  
**NIM. 1711130100**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan teori Ibnu Khaldun dengan pertumbuhan perekonomian yang menurun pada saat ini. Metode penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif kearah deksriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer terdiri dari buku "*muqaddimah*" dan data sekunder dari teori lain berasal dari buku, jurnal, dan website resmi yang relevan terhadap penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan Metode *Content Analysis*. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan jika diterapkan dalam menghadapi resesi di Indonesia. Adanya keterkaitan pada pandangan Ibnu Khaldun ketika tingkat pajak yang dibebankan kepada masyarakat rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Dalam menghadapi resesi pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif dimana kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan nilai belanja pengeluaran selain itu pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi yang dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan.

Kata Kunci : *Ibnu Khaldun, Pajak, Kebijakan Fiskal, Resesi*

## *ABSTRACT*

### **Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia**

**Oleh :  
Dwita Sukmalia  
NIM. 1711130100**

The purpose of this study is to determine the relationship between Ibn Khaldun's theory and the current declining economic growth. This research method is library research with a qualitative approach towards descriptive with the data sources used are primary data consisting of the book "muqaddimah" and secondary data from other theories from books, journals, and official websites that are relevant to the research. The data that has been collected is analyzed using the Content Analysis Method. The results of this study conclude that Ibn Khaldun's thoughts are very relevant if applied in facing a recession in Indonesia. There is a link in Ibn Khaldun's view when the level of tax charged to the community is low, it will have an incentive impact on business activities which naturally encourages trade activities, increasing tax revenues accompanied by economic welfare. In the face of a recession, the government issued an expansionary fiscal policy in which the policy was used to increase the value of expenditure spending. In addition, the government issued many tax incentives for taxpayers affected by the recession which were intended to encourage the economic stimulus to keep running.

*Keywords : Ibnu Khaldun, Taxes, Fiscal Policy, Recession*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia**” Shalawat dan salam juga tak henti penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu, yang sudah memberikan motivasi demi keberhasilan dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam Strata 1 (S-1).
3. Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang sudah

mendukung serta mengizinkan kami menimba ilmu pengetahuan.

4. Eka Sri Wahyuni, SE, MM. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu yang memberikan motivasi serta dorongan dalam pelaksanaan tugas akhir sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Amimah Oktarina, ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, terima kasih banyak atas pelayanan yang sangat baik, teratur, dan penuh kesabaran dalam melayani hal apapun.

Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata hebat dan menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 4 Agustus 2021 M  
25 Zulhijah 1442 H  
Penulis

Dwita Sukmalia  
NIM. 1711130100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Literature Review .....	4
B. Kajian Teori .....	5
1. Teori Pajak Ibnu Khaldun .....	6
2. Kebijakan Fiskal.....	12
3. Resesi .....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	20
B. Sumber Data .....	21
C. Pengumpulan Data .....	21
D. Analisis Data .....	22

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Teori Ibnu Khaldun Tentang Pajak.....	23
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak dalam Menghadapi Resesi di Indonesia.....	31

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	35
B. Saran.....	35

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jurnal Publikasi PDF
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 3 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 4 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Jurnal
- Lampiran 6 : Lembar Saran Penguji
- Lampiran 7 : Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan data BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,07%.<sup>1</sup> Pada kuartal II-2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%.<sup>2</sup> Dengan ini menandakan negara akan memasuki resesi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut selama dua kuartal.<sup>3</sup> Penerimaan pajak hingga agustus 2020 Rp 676,9 T atau 56,5% dari target penerimaan pajak, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah 15,6% dalam penerimaan pajak yang penurunan sangat tajam adalah pajak PPH migas dari sektor usaha mengalami penurunan.<sup>4</sup>

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang di maksudkan untuk mengendalikan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019," *Www.Bps.Go.Id*, last modified 2019.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020," *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*.

<sup>3</sup> M Farid, "Krisis Politik Dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) Dalam Perspektif Konstelasi Global Dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. Edisi 40 (2019), h.38

<sup>4</sup> "Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020," *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup> Dalam Perekonomian, kebijakan fiskal idealnya bersifat automatic stabilizer. Yang dimana perekonomian negara yang mengalami ekspansif maka pengeluaran negara akan bertambah dan penerimaan pajak oleh pemerintah berkurang. Sedangkan pada saat perekonomian kontraktif, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan tarif pajak dan pengurangan pengeluaran pemerintah.<sup>6</sup>

Dalam perpajakan, Ibnu Khaldun memberikan sumbangan pemikiran dalam bukunya Muqqadimah. Menurut Ibnu Khaldun pajak merupakan sumber utama dari pemasukan negara karena itulah pajak harus dikelola agar memberikan hasil yang maksimal. Harus diketahui bahwa pada awal dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah dan pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Inti dari teori Ibnu Khaldun yaitu untuk menurunkan pembebanan pajak atas jumlah

---

<sup>5</sup> Fahdil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2 (2017). h.167

<sup>6</sup> Novi Mubyarto, "Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun)," *Nalar Fiqh* Vol. 10, No. 2 (2014). h.2

individu-individu yang mampu melakukan aktivitas usaha agar lebih insentif dan mengembangkan usaha. Karena dengan cara ini mereka mendorong memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar bagi pemerintah.<sup>7</sup>

Berdasarkan masalah dan pemikiran yang diuraikan diatas maka penulis tertarik membahas teori Ibnu Khaldun tentang pajak dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana keterkaitan teori pajak persektif Ibnu Khaldun terhadap resesi yang dihadapi Indonesia.

#### B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang kebijakan fiskal khusus pajak dalam menghadapi resesi di Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang kebijakan fiskal khusus pajak dalam menghadapi resesi di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, keempat. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). h. 348

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Literature Review

Pembahasan mengenai Pemikiran pajak oleh Ibnu Khaldun telah dilakukan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Jurnal Nasional oleh Agustri yang berjudul “*Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun*”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pemungutan pajak pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai keadilan. Jika nilai keadilan ini diterapkan maka pemerintah dan masyarakat akan diuntungkan. Sebaliknya, apabila nilai keadilan tidak ditegakkan dalam memungut pajak maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat, namun juga pemerintahnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori Ibnu Khaldun yang hanya berfokus pada Pemikiran pajak oleh Ibnu Khaldun sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai teori pajak dalam menghadapi resesi di Indonesia secara spesifik dengan menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai bahan pemikiran. Persamaan terletak pada sama sama meneliti teori pajak dari Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab Muqadimmah.

2. Jurnal Nasional oleh Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir dan Sayri yang berjudul “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”. Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan didunia perpajakan di Indonesia mulai dari kurang taatnya wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingginya pajak yang dilakukan oleh pemerintah, serta penyelewengan dana pajak serta petugas pajak yang menimbun dana pajak tersebut. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian ini berfokus pada relevansi sistem ekonomi islam dengan kondisi perekonomian modern saat ini sedangkan penelitian yang dilakukan mengenai teori pajak Ibnu Khaldun dalam menghadapi resesi di Indonesia. Persamaan terletak pada sama sama meneliti tentang teori pajak dari Ibnu Khaldun.
3. Jurnal Nasional oleh Desi Isnaini “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara”. Menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal dan peranan kebijakan fiskal secara konvensional dan islam. Hasil dari Penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dilakukan dengan pembangunan disertai keadilan dan stabilitas.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Pajak Ibnu Khaldun

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H atau 1332 M. Berdasarkan keturunannya, Ibnu khaldun dengan Wail Bin Hajar seorang sahabat Nabi Muhammad SAW masih bersilsilah. Ibnu khaldun mempunyai nenek moyang yang berasal dari Hadrmaut. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir, pada 25 Ramadhan 808 H/1406 M.<sup>8</sup>

Dijelaskan dalam bukunya Ibnu Khaldun berjudul *Muqaddimah*, teori perpajakan merupakan salah satu karya yang memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi dimana teori ini lebih dahulu dibandingkan teori Adam Smith tentang *Canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakan (Persamaan, Kepastian, Keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan). Dalam menjalankan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian masing-masing negara membutuhkan sumber daya yang dikumpulkan

---

<sup>8</sup> Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*, ed. Masturi Ilham, Malik Supar, and Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.1079

pemerintah dengan berbagai cara yang paling penting diantaranya adalah pajak yang menjadi fokus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendukung keseimbangan politik dan anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang di masing-masing negara. Jika pendapatan bukan pengeluaran besar, penduduk menjadi lebih menguntungkan dan negara akan mengalami pertumbuhan.<sup>9</sup>

Dalam sebuah negara, pajak yang dibebankan kepada rakyat kecil maka akan mendorong rakyat akan terus aktif dalam melakukan bisnis sehingga dapat meningkatkan produksi dan populasi dengan semakin banyaknya bisnis akan membuat penerimaan pajak menjadi meningkat dan sebaliknya pajak yang tinggi akan membuat masyarakat enggan melakukan bisnis yang akan mempengaruhi produksi dan populasi sehingga hal ini akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pada akhirnya, jika beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat begitu besar, maka secara bertahap kegiatan ekonomi akan melambat dan

---

<sup>9</sup> Abdul Azim Islahi, "Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today," *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015), h.6

masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif.<sup>10</sup>

Ibnu khaldun menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Dalam pengertian ini, ia adalah pelopor Keynes. Dia mengatakan “peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Alasannya, negara merupakan pasar terbesar bagi dunia dan sumber peradaban. Jika penguasa mengakumulasi penerimaan pajak atau hasil penerimaan ini tidak terlihat dan tidak membelanjakannya untuk tujuan yang dimaksudkan, maka dana yang disimpan di pengadilan dan para pendukungnya akan berkurang”.<sup>11</sup> Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk belanja, rakyat akan dijauhkan padanya. Jika para pemimpin sebuah negara menahan dan menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak, dan mereka tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang ada di tangan pemimpin dan pegawai pemerintah akan berkurang. Hal ini dikarenakan mereka harus membayar gaji aparatur negara. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian masyarakat dibawahnya yang

---

<sup>10</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun,” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, no. No. 1 (2015). h.3

<sup>11</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.141

menjalankan perekonomian tersebut. Pendapatan pemerintah dari pajak yang dikumpulkan dari pedagang juga akan berkurang. Dan negara akan menderita karena sedikit pendapatan dari pajak. Oleh karena itu pemerintah harus membangun kota dengan cepat, juga pemerintah harus dekat dan mengayomi rakyat dengan cara memberikan subsidi modal terhadap rakyat dengan begitu pajak yang didapatkan akan bertambah.<sup>12</sup>

Seiring perkembangan negara dan pergantian kekuasaan akan muncul tradisi baru dalam kemewahan dan kenikmatan yang dirasakan. Hal tersebut membuat pengeluaran meningkat sehingga pembebanan pajak meningkat dan yang menjadi sasaran atas pembebanan pajak adalah rakyat, para pembajak tanah, petani, dan orang-orang yang menjadi sasaran wajib lainnya. Namun pembebanan melebihi batas wajar sehingga rakyat merasa terbebani akan pajak. Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak kepada perekonomian negara itu sendiri.<sup>13</sup> Ibnu Khaldun melihat kemewahan sebagai penghalang untuk mencapai kemakmuran. Kemewahan juga akan menyebabkan bangsa akan terlena dalam menikmati keuntungan yang diraih.

---

<sup>12</sup> Nur Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). h.255

<sup>13</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.498

Dengan adanya kemewahan yang dilakukan pemerintah membuat tarif pajak naik dan berdampak terhadap pemasukan pajak yang menyebabkan rakyat berasumsi bahwa pemerintah tidak bijaksana dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak.<sup>14</sup>

Dalam pandangan Ibnu khaldun katanya dalam kitab Muqaddimah “pada awal berdirinya suatu negara, ada banyak pajak dan sebagian kecil dari pajak itu dibebankan pada individu” kemudian Ibnu khaldun juga mengatakan “bahwa pada akhir negara, jumlah pajaknya kecil dan bahkan banyak pungutan yang dibebankan pada individu”.<sup>15</sup>

Begitu banyaknya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi penyebab konsep pajak yang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari pemungutan pajak dan memberi dampak negatif terhadap produksi. Konsep pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan rakyat harus ikut andil dalam mengawasi pengelolaan pajak agar tidak terjadi penyelewengan pengeluaran

---

<sup>14</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.”. h.9

<sup>15</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.493

pajak tetapi pemerintah juga harus ikut campur dalam upaya peningkatan pajak.<sup>16</sup>

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, jika pemerintah ikut serta dalam perdagangan dapat menyebabkan kerusakan struktur fiskal jika maksud dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan sendiri maka masyarakat akan gelisah dalam menjalankan usahanya dan banyak perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara sendiri. Hal ini dikarenakan kepala negara dalam melakukan bisnis menggunakan sistem monopoli. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik monopoli tidak sebanding dengan penurunan nilai pajak yang diperoleh negara. Sehingga secara tidak langsung pemerintah mengurangi pendapatan pajak yang sebenarnya dihasilkan oleh petani dan pedagang<sup>17</sup>.

Jadi, Ibnu Khaldun menawarkan konsep keadilan dalam perpajakan. Dimana dalam konsep Ibnu Khaldun membatasi peran pemerintah tidak terlalu jauh dalam masalah pasar. Termasuk dalam masalah perpajakan. Pemungutan pajak berdasarkan keadilan. Pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Kemakmuran cenderung beredar antara masyarakat dan

---

<sup>16</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.4

<sup>17</sup> Ibid. h.12

pemerintah dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjauhkan belanja negara dari masyarakat karena akan menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Kewajiban pajak berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, jika terdapat perbedaan ruang, waktu dan tempat.<sup>18</sup>

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam upaya mendorong stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara yang dimaksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup> kebijakan fiskal di Indonesia mengacu pada kebijakan pemerintah yang terbukti mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran serta penerimaan pemerintah.<sup>20</sup> Tujuan Kebijakan fiskal yaitu:

---

<sup>18</sup> Ibid. h.14

<sup>19</sup> Desi Isnaini, "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara," *Al-Intaj* Vol. 3, No.1 (2017), h.104

<sup>20</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2, No. 2 (2018), h.128

a. Meningkatkan kesempatan kerja

Kebijakan fiskal dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena merupakan indikator kesejahteraan suatu negara. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah dan masyarakat harus ikut serta mengoptimalkan kemampuannya, salah satunya dalam bentuk UKM.

b. Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

Adanya ketimpangan Pendapatan akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengeluaran kebutuhan untuk masyarakat.

c. Investasi

Pemerintah dapat melakukan peningkatan laju investasi dalam pengoptimalan kegiatan investasi berbagai sektor swasta ataupun pemerintah yang berpeluang meningkatkan investasi untuk kebutuhan masyarakat.

d. Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara

dengan cara efektivitas pendapatan dan efisiensi pengeluaran negara.<sup>21</sup>

Pajak adalah retribusi masyarakat kepada negara yang yang berdasarkan perundang-undangan yang tidak dapat dibalas langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditunjukkan bagi kemakmuran. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara. Penerimaan pajak pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pajak juga dapat mempengaruhi perilaku produksi dan konsumsi masyarakat. Beberapa fungsi pajak yaitu:<sup>22</sup>

a. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, pembelian barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

---

<sup>21</sup> Ina Heliany, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia," *Prosiding Seminar Stiami* Vol. 8, No. 1 (2021), h.17-18

<sup>22</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." h.130

b. Fungsi mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi pengaturan, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun luar negeri, disediakan fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, maka pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, penggunaan yang efektif dan efisien dalam pajak.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang berhasil dihimpun oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan masyarakat, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara dikotomis yaitu pembagian jenis yang saling bertentangan, fungsi pajak dibedakan menjadi 2 yaitu, fungsi *budgetair* pajak digunakan untuk memasukan pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara guna membiayai pembangunan.<sup>23</sup> Kebijakan pemerintah dalam perpajakan dengan menerapkan pengampunan pajak diharapkan akan menambah pajak yang terkumpul dalam waktu yang singkat dan jumlah signifikan. Dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat mengoptimalkan pendapatan pajak.<sup>24</sup>

Fungsi *regulair* kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan ekonomi dimana tujuannya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata dalam bidang hukum ekonomi sosial. Dalam hal ini pajak dijadikan pemerintah sebagai pengatur dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dituju dari program pengampunan pajak secara *regulair* yaitu mempercepat dan restrukturisasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada

---

<sup>23</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (2020), h.175

<sup>24</sup> Agus Iwan Kesuma, "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak" *si : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* Vol. 12, No. 2 (2016)

kenaikan investasi, penurunan tingkat suku bunga dan perbaikan nilai tukar rupiah.<sup>25</sup>

### 3. Resesi

Resesi adalah pertumbuhan negatif dalam pertumbuhan ekonomi yang nyata atau bisa dikatakan terjadinya penurunan produk domestik bruto atau pendapatan nasional suatu negara selama dua triwulan berturut-turut. Resesi ekonomi yang ditandai dengan ekonomi global yang lemah dan dampaknya mempengaruhi perekonomian nasional di dunia. Resesi ekonomi secara bersamaan mengakibatkan semua aktivitas ekonomi akan mengalami penurunan antara lain keuntungan perusahaan, lapangan kerja, dan investasi.<sup>26</sup>

Bicara mengenai resesi ekonomi, peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan menjadi salah satu aspek pemicu terjadinya resesi ekonomi, hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam jangka panjang pengangguran dan penurunan pendapatan akan berakibat pada penurunan kesejahteraan yang besar. Dampak besar yang terjadi dari resesi ekonomi yang berkepanjangan akan mengakibatkan penurunan kesehatan mental pada populasi satu negara. Penurunan kesehatan mental ini

---

<sup>25</sup> Ibid. h.277

<sup>26</sup> Elok, Bagas Arya Wiguna, and Ahmad Ilham Suhaemy, "Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Resesi Ekonomi Indonesia 2020" Vol. 1, no. No. 1 (2021). h.19

merupakan cerminan dari masyarakat yang menghadapi kesulitan distribusi kesejahteraan secara ekstrim

Terdapat beberapa sumber dari terjadinya resesi ekonomi. Misalnya salah satu penyebab terjadinya resesi adalah terjadinya perubahan harga input yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Tentu saja perubahan harga yang menyebabkan terjadinya resesi adalah perubahan harga yang cukup tajam dibanding sebelumnya. Kenaikan harga minyak misalnya, dapat mengakibatkan kenaikan harga secara keseluruhan dan akan mengurangi permintaan. Di samping itu, kebijakan moneter atau fiskal yang kontraktif yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi inflasi juga dapat memicu resesi apabila digunakan secara berlebihan. Kebijakan yang digunakan berlebihan dapat menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya mengakibatkan resesi.

Secara umum, beberapa karakteristik dari resesi ekonomi seperti: 1) Secara khusus resesi ekonomi dikaitkan dengan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2%, dan dalam kasus yang parah bisa mencapai 5%; 2) Terjadinya penurunan produksi industri dan investasi serta penurunan tingkat konsumsi yang besar juga dapat menjadi pemicu dari terjadinya resesi; 3) Penurunan tajam aktivitas perdagangan internasional

seperti ekspor dan impor selama periode perlambatan ekonomi; dan 4) Peningkatan pengangguran, penurunan permintaan barang dan jasa, serta adanya gejolak di pasar keuangan juga menjadi pemicu terjadinya resesi ekonomi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mansur Juner Shanti Darmastuti, "COVID-19 Dan Kebijakan Dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipinan Dan Singapura," *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* Vol. 4, no. No. 1 (2021). h.74-75

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *penelitian library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka digunakan untuk menggali pemikiran satu gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada. Penelitian ini lebih menuntut kejelasan peneliti serta menekankan aspek analisa dan kajian teks, terutama dengan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Sehingga dengan metode ini dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel maupun opini.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, metode deskriptif analisis ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam pola deskriptif, penulis menggambarkan penalaran secara luas tentang pemikiran

Ibnu Khaldun tentang pajak dengan kejadian atau fenomena resesi yang akan terjadi di Indonesia.

## B. Sumber Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sekunder.

1. Data Primer, yakni karya yang dihasilkan dari pemikiran Ibnu Khaldun dari kitab Muqadimah diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar 2001.
2. Data Sekunder, merupakan data yang digunakan penulis sebagai penguat dilengkapi penjelasan terhadap sumber primer berupa artikel ilmiah dan website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi relevan terhadap penelitian.

## C. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa, hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik atau menyeluruh elemen yang akan mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder adapun data-data yang dikumpulkan dapat berupa buku, artikel ilmiah dan website.

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data ialah dengan cara mengadakan pengkajian dan penelaahan

terhadap literature-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan

#### D. Analisis Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal yang ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber yang ada.

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan peneliti adalah metode *content analysis*. Metode *content analysis* adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu kemudian mengkritisi. Dengan metode *content analysis* tersebut peneliti dapat menganalisis isi pemikiran Ibnu Khaldun sehingga dapat disajikan data dan hasil penelitian yang dipaparkan secara objektif dan sebenarnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Teori Ibnu Khaldun tentang Pajak

Dijelaskan dalam bukunya Ibnu Khaldun berjudul *Muqaddimah*, teori perpajakan merupakan salah satu karya yang memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi dimana teori ini lebih dahulu dibandingkan teori Adam Smith tentang *Canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakan (Persamaan, Kepastian, Keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan). Dalam menjalankan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian masing-masing negara membutuhkan sumber daya yang dikumpulkan pemerintah dengan berbagai cara yang paling penting diantaranya adalah pajak yang menjadi fokus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendukung keseimbangan politik dan anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang di masing-masing negara. Jika pendapatan dan pengeluaran besar, penduduk menjadi lebih menguntungkan dan negara akan mengalami pertumbuhan.<sup>28</sup>

Dalam sebuah negara, pajak yang dibebankan kepada rakyat kecil maka akan mendorong rakyat akan terus aktif dalam melakukan bisnis sehingga dapat meningkatkan

---

<sup>28</sup> Abdul Azim Islahi, "Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today," *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015), h.6

produksi dan populasi dengan semakin banyaknya bisnis akan membuat penerimaan pajak menjadi meningkat dan sebaliknya pajak yang tinggi akan membuat masyarakat enggan melakukan bisnis yang akan mempengaruhi produksi sehingga hal ini akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pada akhirnya, jika beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat terlalu besar, maka secara bertahap aktivitas ekonomi akan melambat dan masyarakat akan malas untuk membuka usaha yang produktif.<sup>29</sup>

Hal yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini disebut dengan siklus fiskal artinya sumber pendapatan yang diperoleh dari sebuah negara salah satunya dari pajak tersebut harus memperhatikan keadaan kondisi ekonomi masyarakatnya. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang menaikkan jumlah pajak terhadap masyarakatnya. Karena dengan banyaknya pembebanan pajak terhadap masyarakat tidak hanya akan berdampak negatif bagi masyarakatnya dengan matinya produksi dari masyarakat, namun juga akan berdampak kepada pemerintahannya yaitu kerugian terhadap negara dalam hal pemasukkan kas negara akan berkurang.<sup>30</sup>

Ibnu khaldun menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Dalam pengertian ini, ia adalah pelopor Keynes. Dia mengatakan “peningkatan belanja

---

<sup>29</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun,” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, No. 1 (2015), h.3

<sup>30</sup> Ibid. h.10

pemerintah akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Alasannya, negara merupakan pasar terbesar bagi dunia dan sumber peradaban. Jika penguasa mengakumulasi penerimaan pajak atau hasil penerimaan ini tidak terlihat dan tidak membelanjakannya untuk tujuan yang dimaksudkan, maka dana yang disimpan di pengadilan dan para pendukungnya akan berkurang”. Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk belanja, rakyat akan dijauhkan padanya. Jika para pemimpin sebuah negara menahan dan menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak, dan mereka tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang ada di tangan pemimpin dan pegawai pemerintah akan berkurang. Hal ini dikarenakan mereka harus membayar gaji aparatur negara. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian masyarakat dibawahnya yang menjalankan perekonomian tersebut. Pendapatan pemerintah dari pajak yang dipungut dari pedagang juga akan berkurang. Karena itu, total pengeluaran mereka menjadi berkurang. Mengingat bahwa mereka adalah bagian penting dari penduduk dan belanjanya merupakan bagian penting dari pasar, maka dunia usaha juga akan terganggu dan laju keuntungan usaha akan merosot, sehingga menimbulkan penurunan dalam penerimaan pajak. Kekayaan cenderung berputar pada segelintir orang dan penguasa, dari dia kepada mereka dan mereka kepad dia. Dengan demikian, jika penguasa

menahannya untuk berbelanja, rakyat akan dijauhkan darinya dan negara akan menderita dari pendapatan pajak yang buruk.<sup>31</sup>

Oleh karena itu pemerintah harus membangun kota dengan cepat, juga pemerintah harus dekat dan mengayomi rakyat dengan cara memberikan subsidi modal terhadap rakyat dengan begitu pajak yang didapatkan akan bertambah. Dengan pemerintah melakukan belanja dapat meningkatkan laju produksi dan melalui pajaknya akan melemahkan produksi, pemerintah akan membangun pasar untuk menaikkan belanja masyarakat. Jika penurunan belanja masyarakat berkurang akan berefek pada kegiatan usaha sehingga keuntungan usaha akan berkurang dan penerimaan pajak juga ikut berkurang. Dengan itu pemerintah harus melakukan belanja yang tinggi yang bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara mempercepat pembangunan kota dan memberikan subsidi modal untuk masyarakat.<sup>32</sup>

Seiring perkembangan negara dan pergantian kekuasaan akan muncul tradisi baru dalam kemewahan dan kenikmatan yang dirasakan. Hal tersebut membuat pengeluaran meningkat sehingga pembebanan pajak juga meningkat dan yang menjadi sasaran atas pembebanan pajak adalah rakyat,

---

<sup>31</sup> Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. h.141

<sup>32</sup> Nur Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.255

para pembajak tanah, petani, dan orang-orang yang menjadi sasaran wajib lainnya. Namun pembebanan melebihi batas wajar sehingga rakyat merasa terbebani akan pajak. Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak kepada perekonomian negara itu sendiri.<sup>33</sup> Ibnu Khaldun melihat kemewahan sebagai penghalang untuk mencapai kemakmuran. Kemewahan juga akan menyebabkan bangsa akan terlena dalam menikmati keuntungan yang diraih. Dengan adanya kemewahan yang dilakukan pemerintah membuat tarif pajak naik dan berdampak terhadap pemasukan pajak yang menyebabkan rakyat berasumsi bahwa pemerintah tidak bijaksana dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak.<sup>34</sup>

Pajak yang disalahgunakan bukan untuk pembangunan negara akan berdampak pada kehancuran negara itu sendiri sebagai akibat dari bermewah-mewahan dan berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan negara dari pasar rakyat dan transaksi jual beli. Negara harus mengawasi pengelola pajak agar tidak disalahgunakan. Maka dari itu sangatlah penting bagi pemerintah untuk mengendalikan lembaga-

---

<sup>33</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.498

<sup>34</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.9

lembaga fiskal agar pemerintah dan rakyat tidak dirugikan serta pembangunan negara dan prasarana tidak terhambat.<sup>35</sup>

Dalam pandangan Ibnu khaldun dalam kitab Muqaddimah “pada awal berdirinya suatu negara, ada banyak pajak dan sebagian kecil dari pajak itu dibebankan pada individu” kemudian Ibnu khaldun juga mengatakan “bahwa pada akhir negara, jumlah pajaknya kecil dan bahkan banyak pungutan yang dibebankan pada individu”.

Begitu banyaknya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi penyebab konsep pajak yang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari pemungutan pajak dan memberi dampak negatif terhadap produksi. Konsep pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan rakyat harus ikut andil dalam mengawasi pengelolaan pajak agar tidak terjadi penyelewengan pengeluaran pajak tetapi pemerintah juga harus ikut campur dalam upaya peningkatan pajak. Oleh karena itu, pembebanan pajak yang terlalu tinggi akan membuat oknum pejabat memakai pajak untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif, bermewah-mewahan dan dipenuhi

---

<sup>35</sup> Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sayri, “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun,” *Jurnal Al-Qardh* Vol. 2, no. No. 2 (2016). h.100

dengan fasilitas mahal. Pembebanan pajak yang tinggi juga akan membebankan rakyat.<sup>36</sup>

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, jika pemerintah ikut serta dalam perdagangan dapat menyebabkan kerusakan struktur fiskal jika maksud dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan sendiri maka masyarakat akan gelisah dalam menjalankan usahanya dan banyak perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara sendiri. Hal ini dikarenakan kepala negara dalam melakukan bisnis menggunakan sistem monopoli. Menurut Ibnu Khaldun, keuntungan yang diperoleh dari praktik monopoli tidak sebanding dengan penurunan nilai pajak yang diperoleh negara. Oleh karena itu, secara tidak langsung pemerintah mengurangi penerimaan pajak yang sebenarnya dihasilkan oleh petani dan pedagang. Menurut Ibnu Khaldun, seorang kepala negara seharusnya bisa membandingkan dan melihat tentang hal ini dengan jelas, bahwa keuntungan yang diperolehnya dari praktik monopoli perdagangan tidak sebanding dengan penurunan nilai nilai pajak untuk negara yang diperolehnya. Apabila membandingkan pendapatan pajak yang diperoleh dengan keuntungan yang sedikit ini, dia akan tahu bahwa keuntungan yang diperolehnya dari perdagangan dan pertanian amat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan pajak. Sebenarnya dia kehilangan

---

<sup>36</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.4

sejumlah besar pendapatan pajak, sejauh hubungannya dengan jual beli.<sup>37</sup>

Jadi, Ibnu Khaldun menawarkan konsep keadilan dalam perpajakan. Dimana dalam konsep Ibnu Khaldun membatasi peran pemerintah tidak terlalu jauh dalam masalah pasar. Termasuk dalam masalah perpajakan. Pemungutan pajak berdasarkan keadilan. Pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Kemakmuran cenderung beredar antara masyarakat dan pemerintah dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjauhkan belanja negara dari masyarakat karena akan menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Kewajiban pajak berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, jika terdapat perbedaan ruang, waktu dan tempat.<sup>38</sup>

Ibnu Khaldun sangat menekankan konsep pajak yang adil karena ini adalah hak sebagai warga negara. Masyarakat memberikan kewajibannya untuk membayar pajak maka mereka akan mendapatkan hak dari pemerintah. Jika masyarakat hanya mendapatkan hak dan pemerintah hanya memenuhi kewajiban maka keduanya akan dirugikan, sehingga diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar mendapatkan kemaslahatan bersama. Disisi lain keadilan dalam perpajakan mengarahkan kepada kemampuan warga

---

<sup>37</sup> Ibid. h.12

<sup>38</sup> Ibid. h.14

negara dalam membayar pajak dan pengeluaran harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau pembangunan negara.<sup>39</sup>

#### B. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak dalam Menghadapi Resesi di Indonesia

Dijelaskan dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun bahwa, Dalam sebuah negara tingkat pajak yang dibebankan rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan yang membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Bila beban pajak dibebankan kepada masyarakat besar, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi sehingga masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif, pada akhirnya kegiatan ekonomi akan berhenti dan negara akan mengalami kehancuran.<sup>40</sup>

Perekonomian yang awalnya makmur mendapatkan pajak dalam jumlah dan tarif yang dibebankan rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan pajak yang lebih rendah dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena rakyat tidak mendapat keadilan dalam kemakmuran yang menyebabkan rakyat enggan untuk berkerja dan berdampak pada usaha

---

<sup>39</sup> Ibid. h.13

<sup>40</sup> Ibid. h.8

mereka dalam memproduksi. Dengan hal tersebut pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin sengsara serta penerimaan pajak akan menurun.<sup>41</sup>

Kondisi Indonesia telah mengalami resesi ekonomi berdasarkan penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Dampak yang dirasakan adalah meningkatnya angka pengangguran dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Pajak sebagai sektor pendapatan negara terbesar pastinya akan berdampak lebih karena berkurangnya jumlah terhutang pajak menyebabkan penyumbatan pajak sehingga masyarakat membayar pajak berkurang karena kurangnya penghasilan.<sup>42</sup>

Dengan kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal yang tepat dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam menghadapi resesi kebijakan fiskal ekspansif digunakan pemerintah sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, dimana kebijakan fiskal ekspansif pemerintah akan meningkatkan nilai belanja pengeluaran daripada penerimaan.<sup>43</sup> Dari sisi penerimaan pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi. Insentif pajak adalah upaya yang dilakukan

---

<sup>41</sup> Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. h.256

<sup>42</sup> M. Citra Ramadhan, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Pemberian Keringanan Pajak di Masa Resesi Ekonom Berdasarkan Perspektif Islam* Vol. 7, No. 2 (2020), h.135

<sup>43</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." h.126

pemerintah dalam hal berupa pengecualian, pengurangan pengenaan pajak maupun penangguhan pajak.

Dari sisi pengeluaran pemerintah memfokuskan kepada pemberian bantuan darurat kepada populasi yang rentan dan bisnis yang terkena dampak. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan. Dalam upaya mengatasi meningkatnya angka pengangguran pemerintah membentuk program jaringan pengamanan sosial yaitu “Kartu Pra Kerja” yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena PHK.<sup>44</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan dalam menghadapi resesi dimana sistem penerimaan pajak haruslah diarahkan kepada prinsip keadilan kedalam pemungutan pajak. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.<sup>45</sup>

Ibnu Khaldun sangat menekankan konsep pajak yang adil karena ini adalah hak sebagai warga negara. masyarakat memberikan kewajibannya untuk membayar pajak maka mereka akan mendapatkan hak dari pemerintah. Jika masyarakat hanya mendapatkan hak dan pemerintah hanya memenuhi kewajiban maka keduanya akan dirugikan, sehingga diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban

---

<sup>44</sup> Selena Riri Blandina, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani, “Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi” Vol 7, no. No.2 (2020). h.186

<sup>45</sup> Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 2 (2016), h.216

agar mendapatkan kemaslahatan bersama. di sisi lain keadilan dalam perpajakan mengarahkan kepada kemampuan warga negara dalam membayar pajak dan pengeluaran pajak harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau pembangunan negara.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.13

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang konsep pajak dalam pandangan Ibnu Khaldun kemudian dikaitkan pada kondisi resesi yang terjadi di Indonesia saat ini. Adanya keterkaitan pada pandangan Ibnu Khaldun ketika tingkat pajak yang dibebankan kepada masyarakat rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Dalam menghadapi resesi pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif dimana kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan nilai belanja pengeluaran selain itu pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi yang dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan. Dapat dilihat bahwa kebijakan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun bahwa Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.

#### B. Saran

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat dari pemikiran Ibnu Khaldun agar dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan

perkembangan zaman pada saat ini seperti masalah ekonomi pajak dan yang lainnya serta diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah supaya menerapkan keadilan dalam perpajakan perihal keseimbangan hak dan kewajiban keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. “Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19.” *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (2020).
- Agustri. “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, No. 1 (2015).
- Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020.” *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*. Last modified 2020. <https://www.bps.go.id/>.
- . “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020.” *Www.Bps.Go.Id*. Last modified 2019. <https://www.bps.go.id/>.
- Blandina, Selenia Riri, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani. “Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi” Vol 7, No.2 (2020).
- Chahmid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Elok, Bagas Arya Wiguna, and Ahmad Ilham Suhaemy. “Reaksi

- Pasar Modal Terhadap Pengumuman Resesi Ekonomi Indonesia 2020” Vol. 1, No. 1 (2021).
- Farid, M. “Krisis Politik Dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) Dalam Perspektif Konstelasi Global Dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 40 (2019).
- Al Hasan, Fahdil Amin, and Rifqi Qowiyul Iman. “Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017).” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2 (2017).
- Heliany, Ina. “Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Stiarni* Vol. 8, No. 1 (2021).
- Islahi, Abdul Azim. “Ibn Khaldun ’ s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ’ s Theory of Taxation and Its Relevance Today.” *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015).
- Isnaini, Desi. “Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara.” *Al-Intaj* Vol. 3, No.1 (2017).
- Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sayri. “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun.” *Jurnal Al-Qardh* Vol. 2, No. 2 (2016).
- Karim, Adiwarmann A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Keempat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

- Kesuma, Agus Iwan. “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak.” *Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* Vol. 12, no. No. 2 (2016).
- Khaldun, Ibnu. *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. Edited by Masturi Ilham, Malik Supar, and Abidun Zuhri. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Mubyarto, Novi. “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun).” *Nalar Fiqh* Vol. 10, no. No. 2 (2014).
- Nopiardo, Widi. “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, no. No. 2 (2016).
- Nurlina, and Zurjani. “Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2, no. No. 2 (2018).
- Ramadhan, M. Citra. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.” *Pemberian Keringanan Pajak di Masa Resesi Ekonom Berdasarkan Perspektif Islam* Vol. 7, no. No. 2 (2020).
- Shanti Darmastuti, Mansur Juner. “COVID-19 Dan Kebijakan Dalam Menyikapi Resesi Ekonomi : Studi Kasus Indonesia, Filipinan Dan Singapura.” *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora* Vol. 4, no. No. 1 (2021).

“Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020.” *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.  
[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## **Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia**

**Dwita Sukmalia<sup>1</sup>, Ida Yuliana Saputri<sup>2</sup>, Nurul Hak<sup>3</sup>, Amimah Oktarina<sup>4</sup>**

*Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*

*dwitasukmaliaa@gmail.com<sup>1</sup>, idayuli30ana@gmail.com<sup>2</sup>,*

*nurul\_hak@iainbengkulu.ac.id<sup>3</sup>, amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id<sup>4</sup>*

**Abstract** : *Ibn Khaldun is an Islamic scholar with various works, especially in the muqaddimah book which explains the principles of taxation. According to Ibn Khaldun, the imposition of low taxes on the people will make the people more incentivized to do business and develop the business world. On the other hand, the imposition of high taxes on the people will be reluctant to pay taxes so that the production done by the people will decrease and affect the tax revenue itself. The purpose of this study was to determine the relationship between Ibn Khaldun's theory and the current downturn in economic growth. This research method is library research research with a descriptive qualitative approach with the data source used is secondary data consisting of the book "muqaddimah" and other theories derived from books, journals, and official websites that are relevant to the research. The data that has been collected is analyzed using the Content Analysis Method. This study concludes that Ibn Khaldun's thoughts are very relevant when applied in facing the recession in Indonesia*

**Keywords** : *Ibn Khaldun, Taxes, Fiscal Policy, Recession*

**Abstrak** : *Ibnu khaldun merupakan cendekiawan islam dengan berbagai karya terutama dalam buku muqaddimah yang menjelaskan prinsip perpajakan. Menurut Ibnu khaldun, pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan teori Ibnu khaldun dengan pertumbuhan perekonomian yang menurun pada saat ini. Metode penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif kearah deksriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari buku "muqaddimah" dan teori lain berasal dari buku, jurnal, dan web resmi yang relevan terhadap penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan Metode *Content Analysis*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan jika diterapkan dalam menghadapi resesi di Indonesia.*

**Kata Kunci** : *Ibnu Khaldun, Pajak, Kebijakan Fiskal, Resesi*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan data BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,07%.<sup>47</sup> Pada kuartal II-2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32%.<sup>48</sup> Dengan ini menandakan negara akan memasuki resesi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut selama dua kuartal.<sup>49</sup> Penerimaan pajak hingga agustus 2020 Rp 676,9 T atau 56,5% dari target penerimaan pajak, maka penerimaan pajak sampai akhir agustus adalah 15,6% dalam penerimaan pajak yang penurunan sangat tajam adalah pajak PPH migas dari sektor usaha mengalami penurunan.<sup>50</sup>

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang di maksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>51</sup> Dalam Perekonomian, kebijakan fiskal idealnya bersifat automatic stabilizer. Yang dimana perekonomian negara yang mengalami ekspansif maka pengeluaran negara akan bertambah dan penerimaan pajak oleh pemerintah berkurang. Sedangkan pada saat perekonomian kontraktif, pemerintah melakukan peningkatan

---

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019," *Www.Bps.Go.Id*, last modified 2019,

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020," Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019.

<sup>49</sup> M Farid, "Krisis Politik Dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) Dalam Perspektif Konstelasi Global Dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. Edisi 40 (2019), h.38

<sup>50</sup> "Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

<sup>51</sup> Fahdil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2 (2017). h.167

penerimaan tarif pajak dan pengurangan pengeluaran pemerintah.  
52

Ibnu Khaldun berpendapat Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Konsep pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal hal ini akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>53</sup> Khaldun telah menekankan prinsip perpajakan yaitu “harus diketahui bahwa pada awal dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah, bila dibebankan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. Perusahaan kultur berkembang dan naik karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Bila perusahaan kultur berkembang jumlah iuran individu dan pembebanan pajak naik akibatnya pendapatan pajak naik.”<sup>54</sup>

“ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap milik orang lain akan mengurangi keinginan mereka untuk mencari kehidupan dan mendapatkan kekayaan dan jika keengganan untuk mendapatkan kehidupan itu harus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. Semakin besar tekanan, semakin besar pengaruhnya terhadap upaya kerja mereka dan jika masyarakat tidak mau mencari nafkah dan berhenti bekerja maka pasar akan mendeg dan kondisi masyarakat akan semakin terpuruk” Penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia

---

<sup>52</sup> Novi Mubyarto, “Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun),” *Nalar Fiqh* Vol. 10, No. 2 (2014). h.2

<sup>53</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun,” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, No. 1 (2015). h.3

<sup>54</sup> Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, keempat. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h.348

mendukung keadilan dalam perpajakan. Ibnu khaldun menekankan prinsip pajak yaitu pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri.<sup>55</sup>

Berdasarkan masalah dan pemikiran yang diuraikan diatas maka penulis tertarik membahas teori ibnu khaldun tentang pajak dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana keterkaitan teori pajak persektif ibnu khaldun terhadap resesi yang dihadapi Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan *penelitian library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan kualitatif kearah deskriptif dengan cara menggambarkan dan mengaitkan teori Ibnu Khaldun tentang pajak dengan kejadian atau fenomena resesi yang akan terjadi di indonesia. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan membaca dan menelaah serta menganalisis literatur yang berasal dari buku Muqadimmah Ibnu Khaldun, jurnal dan web resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan *Metode Content Analysis*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Teori Ibnu Khaldun Tentang Pajak**

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H atau 1332 M. Berdasarkan keturunannya, Ibnu khaldun dengan Wail Bin Hajar seorang sahabat Nabi

---

<sup>55</sup> Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sayri, "Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun," *Jurnal Al-Qardh* Vol. 2, No. 2 (2016), h.100

Muhammad SAW masih bersilsilah. Ibnu khaldun mempunyai nenek moyang yang berasal dari Hadrmaut. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir, pada 25 Ramadhan 808 H/1406 M.<sup>56</sup>

Dijelaskan dalam bukunya Ibnu Khaldun berjudul *Muqaddimah*, teori perpajakan merupakan salah satu karya yang memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi dimana teori ini lebih dahulu dibandingkan teori Adam Smith tentang *Canons of taxation* atau kaidah-kaidah perpajakan (Persamaan, Kepastian, Keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan). Dalam menjalankan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian masing-masing negara membutuhkan sumber daya yang dikumpulkan pemerintah dengan berbagai cara yang paling penting diantaranya adalah pajak yang menjadi fokus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendukung keseimbangan politik dan anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang di masing-masing negara. Jika pendapatan bukan pengeluaran besar, penduduk menjadi lebih menguntungkan dan negara akan mengalami pertumbuhan.<sup>57</sup>

Dalam sebuah negara, pajak yang dibebankan kepada rakyat kecil maka akan mendorong rakyat akan terus aktif dalam melakukan bisnis sehingga dapat meningkatkan produksi dan populasi dengan semakin banyaknya bisnis akan membuat penerimaan pajak menjadi meningkat dan sebaliknya pajak yang tinggi akan membuat masyarakat enggan melakukan bisnis yang akan mempengaruhi produksi dan populasi sehingga hal ini akan

---

<sup>56</sup> Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*, ed. Masturi Ilham, Malik Supar, and Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.1079

<sup>57</sup> Abdul Azim Islahi, "Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today," *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015), h.6

mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pada akhirnya, jika beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat begitu besar, maka secara bertahap kegiatan ekonomi akan melambat dan masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif.<sup>58</sup>

Ibnu khaldun menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian. Dalam pengertian ini, ia adalah pelopor Keynes. Dia mengatakan “peningkatan belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Alasannya, negara merupakan pasar terbesar bagi dunia dan sumber peradaban. Jika penguasa mengakumulasi penerimaan pajak atau hasil penerimaan ini tidak terlihat dan tidak membelanjakannya untuk tujuan yang dimaksudkan, maka dana yang disimpan di pengadilan dan para pendukungnya akan berkurang”.<sup>59</sup> Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk belanja, rakyat akan dijauhkan padanya. Jika para pemimpin sebuah negara menahan dan menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak, dan mereka tidak memiliki uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang ada di tangan pemimpin dan pegawai pemerintah akan berkurang. Hal ini dikarenakan mereka harus membayar gaji aparatur negara. Hal tersebut akan berdampak pada perekonomian masyarakat dibawahnya yang menjalankan perekonomian tersebut. Pendapatan pemerintah dari pajak yang dikumpulkan dari pedagang juga akan berkurang. Dan negara akan menderita karena sedikit pendapatan dari pajak. Oleh karena itu pemerintah harus membangun kota dengan cepat, juga pemerintah harus dekat dan mengayomi rakyat dengan cara memberikan subsidi

---

<sup>58</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” h.3

<sup>59</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.141

modal terhadap rakyat dengan begitu pajak yang didapatkan akan bertambah.<sup>60</sup>

Seiring perkembangan negara dan pergantian kekuasaan akan muncul tradisi baru dalam kemewahan dan kenikmatan yang dirasakan. Hal tersebut membuat pengeluaran meningkat sehingga pembebanan pajak meningkat dan yang menjadi sasaran atas pembebanan pajak adalah rakyat, para pembajak tanah, petani, dan orang-orang yang menjadi sasaran wajib lainnya. Namun pembebanan melebihi batas wajar sehingga rakyat merasa terbebani akan pajak. Pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak kepada perekonomian negara itu sendiri.<sup>61</sup> Ibnu Khaldun melihat kemewahan sebagai penghalang untuk mencapai kemakmuran. Kemewahan juga akan menyebabkan bangsa akan terlenu dalam menikmati keuntungan yang diraih. Dengan adanya kemewahan yang dilakukan pemerintah membuat tarif pajak naik dan berdampak terhadap pemasukan pajak yang menyebabkan rakyat berasumsi bahwa pemerintah tidak bijaksana dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran pajak.<sup>62</sup>

Dalam pandangan Ibnu Khaldun katanya dalam kitab *Muqaddimah* “pada awal berdirinya suatu negara, ada banyak pajak dan sebagian kecil dari pajak itu dibebankan pada individu” kemudian Ibnu Khaldun juga mengatakan “bahwa pada akhir negara, jumlah pajaknya kecil dan bahkan banyak pungutan yang dibebankan pada individu”.<sup>63</sup>

Begitu banyaknya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi penyebab konsep pajak yang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari pemungutan pajak dan

---

<sup>60</sup> Nur Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2010). h.255

<sup>61</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.498

<sup>62</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.”. h.9

<sup>63</sup> Khaldun, *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. h.493

memberi dampak negatif terhadap produksi. Konsep pajak yang ditetapkan tidak selaras dengan tujuan awal akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan rakyat harus ikut andil dalam mengawasi pengelolaan pajak agar tidak terjadi penyelewengan pengeluaran pajak tetapi pemerintah juga harus ikut campur dalam upaya peningkatan pajak.<sup>64</sup>

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, jika pemerintah ikut serta dalam perdagangan dapat menyebabkan kerusakan struktur fiskal jika maksud dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan sendiri maka masyarakat akan gelisah dalam menjalankan usahanya dan banyak perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara sendiri. Hal ini dikarenakan kepala negara dalam melakukan bisnis menggunakan sistem monopoli. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa keuntungan yang diperoleh dari praktik monopoli tidak sebanding dengan penurunan nilai pajak yang diperoleh negara. Sehingga secara tidak langsung pemerintah mengurangi pendapatan pajak yang sebenarnya dihasilkan oleh petani dan pedagang<sup>65</sup>

Jadi, Ibnu Khaldun menawarkan konsep keadilan dalam perpajakan. Dimana dalam konsep Ibnu Khaldun membatasi peran pemerintah tidak terlalu jauh dalam masalah pasar. Termasuk dalam masalah perpajakan. Pemungutan pajak berdasarkan keadilan. Pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Kemakmuran cenderung beredar antara masyarakat dan pemerintah dari pemerintah ke masyarakat dan masyarakat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjauhkan belanja negara dari masyarakat karena akan menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Kewajiban pajak berbeda antara satu

---

<sup>64</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.4

<sup>65</sup> Ibid. h.12

individu dengan individu lainnya, jika terdapat perbedaan ruang, waktu dan tempat.<sup>66</sup>

## 2. Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan dan pengeluaran negara dalam upaya mendorong stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara yang dimaksudkan untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>67</sup> kebijakan fiskal di Indonesia mengacu pada kebijakan pemerintah yang terbukti mengarahkan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran serta penerimaan pemerintah.<sup>68</sup> Tujuan Kebijakan fiskal yaitu:

### a. Meningkatkan kesempatan kerja

Kebijakan fiskal dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena merupakan indikator kesejahteraan suatu negara. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah dan masyarakat harus ikut serta mengoptimalkan kemampuannya, salah satunya dalam bentuk UKM.

### b. Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

Adanya ketimpangan Pendapatan akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat mengeluarkan

---

<sup>66</sup> Ibid. h.14

<sup>67</sup> Desi Isnaini, "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara," *Al-Intaj* Vol. 3, No.1 (2017), h.104

<sup>68</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2, No. 2 (2018), h.128

kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengeluaran kebutuhan untuk masyarakat.

c. Investasi

Pemerintah dapat melakukan peningkatan laju investasi dalam pengoptimalan kegiatan investasi berbagai sektor swasta ataupun pemerintah yang berpeluang meningkatkan investasi untuk kebutuhan masyarakat

d. Stabilitas Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara dengan cara efektivitas pendapatan dan efisiensi pengeluaran negara.<sup>69</sup>

Pajak adalah retribusi masyarakat kepada negara yang yang berdasarkan perundang-undangan yang tidak dapat dibalas langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditunjukkan bagi kemakmuran. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk membiayai anggaran dan pengeluaran negara. Penerimaan pajak pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pajak juga dapat mempengaruhi perilaku produksi dan konsumsi masyarakat. Beberapa fungsi pajak yaitu:<sup>70</sup>

a. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin

---

<sup>69</sup> Ina Helianny, "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia," *Prosiding Seminar Stiami* Vol. 8, No. 1 (2021), h.17-18

<sup>70</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." h.130

seperti belanja pegawai, pembelian barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi mengatur

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi pengaturan, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun luar negeri, disediakan fasilitas keringanan pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, maka pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, penggunaan yang efektif dan efisien dalam pajak.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang berhasil dihimpun oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan masyarakat, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara dikotomis, fungsi pajak dibedakan menjadi 2 yaitu, fungsi *budgetair* pajak digunakan untuk memasukan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara guna membiayai pembangunan.<sup>71</sup> Kebijakan pemerintah dalam

---

<sup>71</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (2020), h.175

perpajakan dengan menerapkan pengampunan pajak diharapkan akan menambah pajak yang terkumpul dalam waktu yang singkat dan jumlah signifikan. Dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat mengoptimalkan pendapatan pajak.<sup>72</sup>

Fungsi *regulair* kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan ekonomi dimana tujuannya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan merata dalam bidang hukum ekonomi sosial. Dalam hal ini pajak dijadikan pemerintah sebagai pengatur dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dituju dari program pengampunan pajak secara *regulair* yaitu mempercepat dan restrukturisasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kenaikan investasi, penurunan tingkat suku bunga dan perbaikan nilai tukar rupiah.<sup>73</sup>

### **3. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak dalam Menghadapi Resesi di Indonesia**

Dijelaskan dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun bahwa, Dalam sebuah negara tingkat pajak yang dibebankan rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan yang membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Bila beban pajak dibebankan kepada masyarakat besar, maka kegiatan perekonomian lambat laun akan mengalami stagnasi sehingga masyarakat akan malas untuk membuka kegiatan usaha yang produktif, pada akhirnya kegiatan ekonomi akan berhenti dan negara akan mengalami kehancuran.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Agus Iwan Kesuma, "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak," *Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* Vol. 12, No. 2 (2016), h.278

<sup>73</sup> Ibid. h.277

<sup>74</sup> Agustri, "Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun." h.8

Perekonomian yang awalnya makmur mendapatkan pajak dalam jumlah dan tarif yang dibebankan rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan pajak yang lebih rendah dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena rakyat tidak mendapat keadilan dalam kemakmuran yang menyebabkan rakyat enggan untuk bekerja dan berdampak pada usaha mereka dalam memproduksi. Dengan hal tersebut pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin sengsara serta penerimaan pajak akan menurun.<sup>75</sup>

Kondisi Indonesia telah mengalami resesi ekonomi berdasarkan penurunan pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut. Dampak yang dirasakan adalah meningkatnya angka pengangguran dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Pajak sebagai sektor pendapatan negara terbesar pastinya akan berdampak lebih karena berkurangnya jumlah terhutang pajak menyebabkan penyumbatan pajak sehingga insentif masyarakat membayar pajak berkurang karena kurangnya penghasilan.<sup>76</sup>

Dengan kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal yang tepat dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam menghadapi resesi kebijakan fiskal ekspansif digunakan pemerintah sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, dimana kebijakan fiskal ekspansif pemerintah akan meningkatkan nilai belanja pengeluaran daripada penerimaan.<sup>77</sup> Dari sisi penerimaan pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi. Dari sisi pengeluaran pemerintah memfokuskan kepada pemberian bantuan darurat kepada populasi yang rentan

---

<sup>75</sup> Chahmid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. h.256

<sup>76</sup> M. Citra Ramadhan, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum," *Pemberian Keringanan Pajak di Masa Resesi Ekonom Berdasarkan Perspektif Islam* Vol. 7, No. 2 (2020), h.135

<sup>77</sup> Nurlina and Zurjani, "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." h.126

dan bisnis yang terkena dampak. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan.<sup>78</sup> Dalam upaya mengatasi meningkatnya angka pengangguran pemerintah membentuk program jaringan pengamanan sosial yaitu “Kartu Pra Kerja” yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena PHK.<sup>79</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan dalam menghadapi resesi dimana sistem penerimaan pajak haruslah diarahkan kepada prinsip keadilan kedalam pemungutan pajak.<sup>80</sup> Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.<sup>81</sup>

Ibn Khaldun sangat menekankan konsep pajak yang adil karena ini adalah hak sebagai warga negara. Masyarakat memberikan kewajibannya untuk membayar pajak maka mereka akan mendapatkan hak dari pemerintah. Jika masyarakat hanya mendapatkan hak dan pemerintah hanya memenuhi kewajiban maka keduanya akan dirugikan, sehingga diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar mendapatkan kemaslahatan bersama. Di sisi lain keadilan dalam perpajakan mengarahkan kepada kemampuan warga negara dalam membayar pajak dan pengeluaran pajak harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau pembangunan negara.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Selena Riri Blandina, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani, “Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi” Vol 7, No.2 (2020), h.187

<sup>79</sup> Ibid. h.186

<sup>80</sup> Dina Eva Silalahi and Rasinta Ria Ginting, “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 3, No. 2 (2020), h.167

<sup>81</sup> Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 2 (2016), h.216

<sup>82</sup> Agustri, “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” h.13

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang konsep pajak dalam pandangan Ibnu Khaldun kemudian dikaitkan pada kondisi resesi yang terjadi di Indonesia saat ini. Adanya keterkaitan pada pandangan Ibnu Khaldun ketika tingkat pajak yang dibebankan kepada masyarakat rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan membuat meningkatnya pendapatan pajak disertai dengan kesejahteraan ekonomi. Dalam menghadapi resesi pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif dimana kebijakan tersebut digunakan untuk meningkatkan nilai belanja pengeluaran selain itu pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak resesi yang dimaksudkan untuk mendorong stimulus perekonomian agar tetap berjalan. Dapat dilihat bahwa kebijakan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun bahwa Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. “Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19.” *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 1 (2020).
- Agustri. “Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibn Khaldun.” *Tamaddun Ummah: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Pembangunan* Vol 1, No. 1 (2015).
- Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020.” *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*.
- . “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020.” *Www.Bps.Go.Id*.
- Blandina, Selena Riri, Alvin Noor Fitriani, and Wulan Septiyani. “Strategi Menghindarkan Indonesia Dari Ancaman Resesi Ekonomi Di Masa Pandemi” Vol 7, No.2 (2020).
- Chahmid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2010.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Farid, M. “Krisis Politik Dan Resesi Ekonomi Hong Kong (2019) Dalam Perspektif Konstelasi Global Dan Potensi Dampaknya Bagi Indonesia.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. Edisi 40 (2019).
- Al Hasan, Fahdil Amin, and Rifqi Qowiyul Iman. “Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017).” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 11, No. 2 (2017).

- Heliany, Ina. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Resesi Ekonomi Di Indonesia." *Prosiding Seminar Stiarni* Vol. 8, No. 1 (2021).
- Islahi, Abdul Azim. "Ibn Khaldun ' s Theory of Taxation and Its Relevance Today." *Turkish Journal of Islamic Economics* (2015).
- Isnaini, Desi. "Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara." *Al-Intaj* Vol. 3, no. No.1 (2017).
- Jirhanuddin, Ahmad Dakhoir, and Sayri. "Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun." *Jurnal Al-Qardh* Vol. 2, No. 2 (2016).
- Karim, Adiwarmn A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Keempat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kesuma, Agus Iwan. "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak." *Inovasi : Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen* Vol. 12, No. 2 (2016).
- Khaldun, Ibnu. *Ibnu Khaldun Mukaddimah (TERJEMAHAN)*. Edited by Masturi Ilham, Malik Supar, and Abidun Zuhri. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Mubyarto, Novi. "Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Merespon Siklus Ekonomi (Pelajaran Dari Kisah Nabi Yusuf Dan Pendapat Ibnu Khaldun)." *Nalar Fiqh* Vol. 10, No. 2 (2014).
- Nopiardo, Widi. "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 14, No. 2 (2016).
- Nurlina, and Zurjani. "Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol 2, No. 2 (2018).
- Ramadhan, M. Citra. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum."

*Pemberian Keringanan Pajak di Masa Resesi Ekonom Berdasarkan Perspektif Islam* Vol. 7, No. 2 (2020).

Silalahi, Dina Eva, and Rasinta Ria Ginting. “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* Vol. 3, No. 2 (2020).

“Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020.” *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax.  
0736 – 51171 Email: aak@iainbengkulu.ac.id

---

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM/PRODI : 1. Dwita Sukmalia/1711130100/Ekonomi Syariah  
2. Ida Yuliana Saputri/1711130106/Ekonomi Syariah

Bersama dengan surat ini kami menyatakan bahwa jurnal kami yang berjudul “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi di Indonesia” bahwasannya telah melakukan submit jurnal pada bulan Maret 2021, Sebelum dikeluarkannya Kebijakan cek Plagiarism oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Demikian Surat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis 1

Dwita Sukmalia  
NIM. 1711130100

Bengkulu, 9 Juni 2021

Penulis 2 ..

Ida Yuliana Saputri  
NIM. 1711130106

Mengetahui  
Pembimbing 1

Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002

Pembimbing 2

Amimah Oktarina, M.E  
NIP. 1992102112018012001



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR  
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Dwita Sukmalia  
NIM : 1711130100  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Anggota : 1. Ida Yuliana Saputri (NIM: 1711130106)  
2. .... (NIM: .....)  
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir: PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG KEBIJAKAN FISKAL KHUSUS  
PAJAK DAN RELEVANSINYA DALAM MENGHADAPI RESESI DI INDONESIA

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Dapat dilaksnkan*

Bengkulu, 15-15- Desember 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Amimah Oktarina, MA  
NIP 199210212018012000

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan  
Ketua Jurusan  
Amimah Oktarina, MA  
NIP 199210212018012000

Bengkulu, .....

Ketua Tim

Mahasiswa

Dwita Sukmalia  
1711130100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kola Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0148/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA  
N I P. : 196606161995031002  
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Amimah Oktarina, MA  
N I P. : 199210212018012000  
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Dwita Sukmalia  
Nim : 1711130100  
Prodi : Ekonomi Syariah
2. N a m a : Ida Yuliana Saputri  
Nim : 1711130106  
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG KEBIJAKAN FISKAL KHUSUS PAJAK DAN RELEVANSINYA DALAM MENGHADAPI RESESI DI INDONESIA.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Wakil Rektor I;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



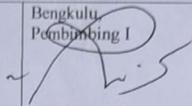
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171  
Fax. 0736 – 51171 Email: aak@iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Dwita Sukmalia/1711130100/Ekonomi Syariah  
Penulis ke : 1  
Nama Jurnal : Baabu AL-ILMI  
Status Jurnal : Terakreditasi  
Judul Jurnal : Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal  
Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi  
Resesi di Indonesia

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	17-11-2020	Pendahuluan dan Metode Penelitian	Perhatikan SPOK dan perjelas teknik analisis data	
2	20-12-2020	Pembahasan	Mempertegas peran dan kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap resesi	
3	01-02-2020	Kesimpulan	Masukkan inti pemikiran Ibnu Khaldun dan relevansi dari resesi	
4	24-02-2020	Referensi	Penulisan referensi menggunakan aplikasi Mendeley	
5	01-03-2020	Abstrak	Menuliskan poin-poin penting dan Perhatikan SPOK	
6	18-03-2020	Jurnal	ACC dan lanjutkan submit	

Bengkulu  
Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A  
NIP. 196606161995031002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171  
Fax. 0736 – 51171 Email: aak@iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Dwita Sukmalia/1711130100/Ekonomi Syariah  
Penulis ke : 1  
Nama Jurnal : Baabu AL-ILMI  
Status Jurnal : Terakreditasi  
Judul Jurnal : Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal  
Khusus Pajak dan Relevansinya Dalam Menghadapi  
Resesi di Indonesia

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	09-10-2020	Pengenalan sistematika dan Penentuan judul jurnal	Mencari referensi dan menentukan judul jurnal yang menarik	f
2	16-10-2020	Pendahuluan	Pendahuluan berisi tentang fakta empiris, fakta literatur, tujuan penelitian dan hipotesis.	f
3	23-10-2020	Metode Penelitian	Mencari metode peneltian yang sesuai dengan judul jurnal	f
4	06-11-2020	Pembahasan	Menambahkan relevansi resesi yang lebih tegas terhadap pemikiran Ibnu Khaldun	f
5	13-11-2020	Kesimpulan dan	Kesimpulan tulis	

		Abstrak	poin penting saja dan Perhatikan SPOK	
6	18-03-2021	Jurnal	ACC dan lanjutkan submit	

	Bengkulu, Pembimbing II  Aminah Oktarina, M.E NIP. 199210212018012001
--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi jurnal

Dixita Sukmalia  
1911120100  
Peminatan Ilmu Khaldun tentang kebijakan Fiskal  
khusus pajak & relevansinya dan pengaruhnya dari Islam

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.	21-7-21	Fokus Masalah	buat laporan individu sesuai fokusnya
2.		halaman depan	lengkapi dg halaman depan (cek sistematika skripsi)
3.		kutipan	jurnal yg terbit/ buku lain bisa dikupien
4.		h. 92 content analysis	} yg itu diakhir bisa dijelaskan di laporan individu
5.		h. 95-96	
6.		laporan hasil	

Bengkulu, 21-7-21  
Pengujii

Dr. Asnani, M.A.  
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
 NIM  
 Judul Skripsi

: Duta Sukmala  
 : 1711130100  
 : Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kegiatan sosial  
 dari Pasai & relevansinya slm menghadapi resesi di m

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1		Penulisan / eppitip Redistribusi Ibnu Khaldun Insentif Risiko di ... Agustus	
2		Paparan / penulisan faktor ... 5 / 4. 91	
3		WEB ...	
4		Dan jel <u>lanjutan</u>	

Bengkulu, 21-7-21  
 Penguji (1)  
  
 Ati Setiawan, M.P.  
 NIP

## Lampiran Curriculum Vitae

### 1. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dwita Sukmalia
2	NIM	1711130100
3	Program Studi	Ekonomi Syariah
4	Jenis Kelamin	Perempuan
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bengkulu, 7 Juli 1998
6	Alamat E-mail	dwitasukmaliaa@gmail.com
7	Nomor Telepon/Hp	082279067109

### 2. Riwayat Pendidikan Formal/Non Formal

No.	Pendidikan	Asal Sekolah/PT	Tahun Tamat
1	SD	SD Negeri 75 Kota Bengkulu	2011
2	SMP	SMP Negeri 8 Kota Bengkulu	2014
3	SMA	SMA Negeri 3 Kota Bengkulu	2017

### 3. Pengalaman Organisasi yang pernah diikuti

No.	Nama Organisasi	Status Dalam Organisasi	Waktu dan Tempat
1.	KSEI-SEM C	Anggota	2019

Semua data yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila

dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan skripsi.